



**TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DALAM UPAYA PENGELOLAAN PULAU TIKUS  
DI PROVINSI BENGKULU**

**Khalifah Sophy Sarahwati\*, Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading Pinilih**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [sophysarahwati@gmail.com](mailto:sophysarahwati@gmail.com)

**Abstrak**

Pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen yaitu pertama perencanaan, diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Kedua pemanfaatan, dilakukan dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar didekatnya. Ketiga pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan dan pengendalian. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Pulau Tikus adalah, aktivitas pemanfaatan oleh manusia, *illegal fishing*, pemanfaatan dan pengelolaan belum optimal, belum ada lembaga aktif yang mengelola sumber daya laut Pulau Tikus, keterbatasan dana, dan fenomena perubahan iklim.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pulau Tikus, Provinsi Bengkulu

**Abstract**

*Management of the Tikus Island area by the Bengkulu Province Marine and Fisheries Service was carried out according to management functions, namely first planning, regulated through an integrated coastal area management approach that integrates various plans prepared by the regional sector. Both utilization, carried out and economically as a whole and integrated with large islands nearby. The third is supervision and control, to ensure the implementation of management of the Tikus Island region in an integrated and sustainable manner carried out supervision and control. The problems faced in the management of Rat Island are, human utilization activities, illegal fishing, utilization and management are not optimal, there is no active institution that manages Tikus Island marine resources, limited funds, and the phenomenon of climate change.*

*Key Words : Management, Tikus Island, Bengkulu Province*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut yang terbesar di dunia karena memiliki kekayaan ekosistem pesisir yaitu hutan mangrove, padang almun dan terumbu karang yang sangat luas dan beragam, demikian pula dalam kekayaan ekosistem laut, potensi lestari sumber daya ikan sebesar 6,7 juta ton pertahun yang telah dimanfaatkan baru mencapai 45%.<sup>1</sup> Potensi kekayaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia yang sangat besar, beraneka ragam dan prospektif.

Melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan.

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan bagian dari urusan

pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi masing-masing.

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai perbatasan Provinsi Lampung jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Salah satu daerah berpotensi untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Bengkulu yaitu Pulau Tikus. Sumber daya yang ada di Pulau Tikus merupakan kawasan sumber daya alam hayati yaitu ekosistem karang dan biota laut yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan wisata dan menjadi daya dukung bagi peningkatan ekonomi daerah. Sejak tahun 2001 Pulau Tikus sudah mengalami abrasi. Dari pengukuran terakhir tahun 2012 luas awal Pulau Tikus mencapai 2,5 hektare, saat ini Pulau Tikus hanya tersisa 0,6 hektare.<sup>2</sup>

Berbeda dengan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia, ekosistem yang dominan di perairan Pulau Tikus adalah ekosistem terumbu karang, yang mempunyai fungsi selain sebagai habitat berbagai jenis ikan dan biota laut, juga diharapkan mampu melindungi pulau dari abrasi akibat gelombang yang besar. Posisi Pulau Tikus yang berada langsung di lautan terbuka Samudera Hindia,

---

<sup>1</sup> Rahardjo A, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 76.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Juli 2018.

menjadikan terumbu karang di sekitar Pulau Tikus berguna sebagai pelindung pantai dari arus dan gelombang.<sup>3</sup>

Wilayah pesisir dan perairan laut Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu dengan potensi utamanya adalah sumberdaya wilayah pesisir dan laut, berdasarkan tupoksinya berada dalam pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Sumberdaya wilayah pesisir mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi di sisi lain juga mempunyai potensi konflik karena adanya kepentingan kewenangan diantara para pihak yang bersifat tumpang tindih serta kompetisi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang ada. Kompleksnya permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Pulau Tikus, Provinsi Bengkulu tentunya menuntut pendekatan penyelesaian yang bersifat integratif dan komprehensif serta bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil yang ada di Provinsi Bengkulu, karena tanpa adanya upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu, maka suatu saat

pulau-pulau kecil tersebut akan lenyap beserta ekosistem yang ada disekitarnya dan Provinsi Bengkulu akan kehilangan salah satu asetnya yang sangat berharga.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya dilapangan.<sup>5</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum

---

<sup>3</sup> Giyanto, *Kondisi Terumbu Karang di Perairan Sisi Timur Pulau Tikus Bengkulu*, (Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, 2017), hlm 2.

---

<sup>4</sup> Deddy Bakhtiar, dkk, *Kajian Karakteristik Ekosistem Perairan Pulau Tikus Kota Bengkulu Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, (Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi BOPT, Universitas Bengkulu, 2013), hlm 6.

<sup>5</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.15

ini adalah deskriptif analitis. Definisi dari deskriptif analitis secara sederhana adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>6</sup>

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi pustaka, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>7</sup> Guna melengkapi data sekunder, dilakukan dengan wawancara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>8</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu yang menjadi penanggungjawab teknis pengelolaan Pulau Tikus.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Lingkup pengelolaan Pulau Tikus terdiri dari:

#### **1. Perencanaan**

Mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil maka perlu pendekatan terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh

<sup>6</sup> Rony Hanintjo Soemitro, *Op.cit*, hlm 97-98.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 254

<sup>8</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 20-21.

sektor dan daerah. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu merupakan salah satu aspek yang penting dari luar kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pembuatan keputusan untuk masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perencanaan wilayah Pulau Tikus dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu rencana strategis dan rencana zonasi.

#### a. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian rencana jangka panjang Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan.

Rencana jangka panjang yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan kawasan Pulau Tikus adalah :

1. Pengembangan Ekowisata
  2. Konservasi, Pendidikan dan Penelitian
  3. Pemantauan dan Evaluasi
  4. Penanganan Perusakan Ekosistem
- b. Rencana Zonasi

Rencana zonasi merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana pembagian zona

kawasan konservasi Pulau Tikus sebagai berikut:

#### 1. Zona inti

Zona Inti yang meliputi: perairan Selatan Pulau Tikus dengan luas sekitar 81,14 ha; dan perairan Karang Bayang dengan luas sekitar 95,62 ha. Peruntukan untuk zona inti kawasan konservasi perairan Pulau Tikus sebagai berikut:

- a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut
- b. Perlindungan tempat bertelur penyu
- c. Perlindungan tempat mencari makan penyu
- d. Perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan
- e. Perlindungan situs budaya/ adat tradisional
- f. Penelitian dan pendidikan

#### 2. Zona perikanan berkelanjutan

Zona Perikanan Berkelanjutan meliputi: perairan Utara Pulau Tikus hingga perairan Karang Bayang dengan luas sekitar 1.102,66 ha. Peruntukan perairan zona perikanan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Perlindungan habitat dan populasi ikan
- b. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan
- c. Budidaya ramah lingkungan
- d. Penelitian dan pengembangan
- e. Pendidikan

### 3. Zona pemanfaatan

Zona pemanfaatan meliputi: perairan Utara Pulau Tikus hingga perairan Barat Pulau Tikus dengan luas sekitar 241,5 ha. Peruntukan zona pemanfaatan di Perairan Pulau Tikus adalah :

- a. Perlindungan habitat dan populasi ikan
- b. Pariwisata dan rekreasi
- c. Penelitian dan pengembangan
- d. Pendidikan

### 4. Zona lainnya

Zona lainnya meliputi: Karang Pulau Tikus dengan luas sekitar 140,85 ha. Peruntukan zona lainnya di Perairan Pulau Tikus adalah :

- a. *Stock Center Coral*
- b. Alur laut
- c. Rumah makan terapung
- d. Dermaga
- e. Penahan gelombang semi permanen
- f. Pariwisata bahari

Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menetapkan Peraturan Daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, peraturan daerah tersebut sudah memasuki tahap proses surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan<sup>9</sup>.

## 2. Pemanfaatan

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan

terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Pulau Tikus telah dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi dan pariwisata.

#### a. Konservasi

Pulau Tikus saat ini masih dalam kategori kawasan pencadangan konservasi dan memasuki tahap untuk mendapatkan SK dari pemerintah Kota Bengkulu. Kawasan konservasi Pulau Tikus ini merupakan hasil kajian ilmiah dari Universitas Bengkulu.

Selain melakukan pencadangan kawasan konservasi Pulau Tikus, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah melakukan rehabilitasi terhadap terumbu karang di perairan Pulau Tikus. Dalam melakukan upaya rehabilitasi ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu.

Upaya rehabilitasi melalui transplantasi karang dilakukan dengan tujuan pemulihan ekosistem laut khususnya terumbu karang yang banyak mengalami kerusakan. Program ini dilaksanakan selain untuk melindungi ekosistem laut di perairan Pulau Tikus yang rentan, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar kawasan konservasi laut akan pentingnya kelestarian ekosistem terumbu karang, sehingga pada waktu yang akan datang masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian ekosistem terumbu karang.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tanggal 27 November 2018

b. Pariwisata

Pulau Tikus saat ini menjadi pusat pariwisata yang sangat diminati oleh para wisatawan dan memiliki pesona alam bawah laut dengan potensi fauna yang ada berupa ekosistem karang dan biota laut. Potensi yang sudah dikembangkan di Pulau Tikus ini antara lain wisata selam, *snorkelling*, dan wisata pantai-pantai. Kegiatan menyelam untuk para wisatawan yang datang dapat dilakukan di sana karena didukung oleh airnya yang jernih serta batu karangnya yang indah. Terdapat beberapa titik spot penyelaman yang cukup bagus untuk menikmati pemandangan bawah laut.

### 3. Pengawasan dan Pengendalian

Upaya menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus. Pengawas atau pengendalian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya pengawasan ini telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan bekerjasama dengan Polisi Air (polair) Daerah Bengkulu, dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku perusakan yang tertangkap di wilayah perairan Pulau Tikus dan kontrol lapangan yang dilakukan di

perairan sekitar wilayah pesisir Provinsi Bengkulu, tetapi dalam praktek dilapangan, pelaksanaan penangkapan oleh polisi air masih belum berjalan dengan baik karena kurang profesionalnya aparat yang bertugas.<sup>10</sup>

### B. Permasalahan-Permasalahan dalam Pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu

Pengelolaan wilayah pesisir umumnya berhadapan dengan berbagai permasalahan yang bersifat kompleks. Hal ini sesuai pula dengan sifat dari ekosistem-ekosistem di wilayah pesisir yang memang bersifat kompleks, karena adanya dua pengaruh besar yaitu ekosistem wilayah daratan dan ekosistem wilayah perairan, baik berupa perairan laut, sungai, muara dan juga laguna

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Pulau Tikus yang menjadikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum bisa dikatakan optimal. Beberapa permasalahannya adalah:

#### 1. Antropogenik

Tekanan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem wilayah pesisir seperti terhadap dan ekosistem terumbu karang dikenal juga dengan istilah *antropogenik*. Tekanan penduduk terhadap potensi di Pulau Tikus juga dapat dilihat dari menurunnya populasi teripang (*holthuroidea*) dan penyu di perairan Pulau Tikus.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tanggal 27 November 2018

## 2. *Illegal Fishing*

Sumberdaya wilayah pesisir di Pulau Tikus, terutama ekosistem terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan, juga disebabkan oleh adanya praktek praktek penangkapan ikan illegal (*illegal fishing*). Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat nelayan di Pulau Tikus, kegiatan *illegal fishing* ini adalah berupa penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun sianida. Hal yang menarik, bahwa kegiatan *illegal fishing* ini dilakukan oleh nelayan yang datang dari luar Pulau Tikus.<sup>11</sup>

## 3. Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Wisata Belum Optimal

Potensi wisata bahari yang ada belum termanfaatkan dengan baik sehingga belum dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut membutuhkan dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Tapi tetap harus diperhatikan agar pengembangan pariwisata ke depan, meskipun memberikan manfaat sosial, ekonomi dan bahkan dapat menunjang pembangunan di bidang lingkungan hidup, akan tetapi juga bisa memberikan dampak negatif. Oleh karena itu pengembangan pariwisata sekitar kawasan konservasi perairan daerah Pulau Tikus, tetap harus memerlukan pengkajian dan analisa dampak untuk dapat diantisipasi.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan kelompok nelayan di kawasan pesisir Pantai Malabero Kota Bengkulu, tanggal 25 November 2018

## 4. Kelembagaan

Belum ada lembaga formal yang aktif mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut di Pulau Tikus. Perlindungan terhadap ekosistem wilayah pesisir dan laut di kawasan Pulau Tikus selama ini belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

## 5. Keterbatasan Dana

Hambatan-hambatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu terbentur masalah dana yang tidak mampu membiayai seluruh program pengelolaan wilayah Pulau Tikus.<sup>12</sup>

## 6. Fenomena Perubahan Iklim

Letak Pulau Tikus yang langsung menghadap ke Samudera Hindia membuat pulau kecil ini rentan terkena dampak abrasi. Peningkatan intensitas terjadinya badai terutama di daerah tropis yang akan mengakibatkan perubahan kondisi fisik daerah pesisir terutama akibat perubahan curah hujan dan perubahan pola angin. Kenaikan permukaan air laut secara langsung mempengaruhi keberadaan ekosistem-ekosistem di sekitar perairan Pulau Tikus.

## IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengelolaan kawasan Pulau Tikus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dilaksanakan menurut fungsi manajemen, yaitu pertama,

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Juli 2018

Perencanaan, dalam pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu perencanaan diatur melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor daerah. Perencanaan berhubungan dengan pembuatan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, pemanfaatan, dalam pemanfaatan Pulau Tikus sudah dimanfaatkan kawasan konservasi, budidaya laut, dan pariwisata. Ketiga, pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian Pulau Tikus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Polisi Air (polair) Daerah Bengkulu.

2. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan Pulau Tikus di Provinsi Bengkulu yaitu:
  - a. Antropogenik (aktifitas pemanfaatan oleh manusia)
  - b. Penangkapan ikan secara illegal
  - c. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi wisata belum optimal
  - d. Belum adanya lembaga formal yang aktif mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut Pulau Tikus.
  - e. Keterbatasan dana
  - f. Fenomena perubahan iklim

## V. Daftar Pustaka

### Buku-Buku:

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Deddy Bakhtiar, dkk, *Kajian Karakteristik Ekosistem Perairan Pulau Tikus Kota Bengkulu Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, (Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi BOPT, Universitas Bengkulu, 2013)

Giyanto, *Kondisi Terumbu Karang di Perairan Sisi Timur Pulau Tikus Bengkulu*, (Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, 2017)

Rahardjo A, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006)

Supriyadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang



Nomor 27 Tahun 2007 tentang  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu  
Nomor 2 Tahun 2012 tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah  
(RTRW) Provinsi Bengkulu  
Tahun 2012-2032

Peraturan Gubernur Bengkulu  
Nomor 42 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas dan Fungsi, Serta Tata  
Kerja Dinas Kelautan dan  
Perikanan Provinsi Bengkulu

#### Jurnal-Jurnal

Abdul Rahman Singkam, *Komunitas  
Ikan Krang di Perairan Pulau  
Tikus Bengkulu*, (Prodi  
Pendidikan Biologi JPMIPA  
FKIP Universitas Bengkulu),  
Jurnal Gradien Vol. 8, No. 2,  
Juli 2012

Diah Irawati Dwi Arini, *Potensi  
terumbu karang Indonesia  
"Tantangan dan Upaya  
Konservasinya"*, (Balai  
Penelitian Kehutanan Manado,  
Info BPK Manado, Vol. 3, No.  
2, 2013)

Okta Pradita Kusuma Putra,  
"Pelaksanaan Tugas dan  
Wewenang Dinas Kelautan dan  
Perikanan dalam Pengelolaan  
Hasil Perikanan di Kabupaten  
Pati", *Diponegoro Law Journal*,  
Vol. 6, No. 1, 2017

R. Dauhari, *Model Pembangunan  
Ekosistem Pulau-Pulau Kecil  
Secara Optimal dan  
Berkelanjutan – Studi Kasus  
Pulau Siberut*, (Majalah Alami,  
Vol 3, Nomor 1, DIT, 1998)

Syamsul Arifin, *Peran dan Fungsi  
Hukum Lingkungan  
Mengantisipasi Dampak  
Perubahan Iklim Pada Sumber  
Daya Pesisir Sumatera Utara*,  
(Jurnal Hukum Samudera  
Keadilan, Vol.10, No.2, Juli-  
Desember 2015)

#### Website

<https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/bengkulu/pulau-tikus-kemolekan-pulau-kecil-bengkulu.html>, diakses pada  
tanggal 24 September 2018